

MEMPROGRAMKAN AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA DESA CIBITUNG TENGAH, KECAMATAN TENJOLAYA, KABUPATEN BOGOR

Rully Trihantana¹, Ermi Suryani², Widi Lestari³

^{1, 2, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

¹rully.trihantana@febi-inais.ac.id, ²ermisuryani@febi-inais.ac.id,

³widilestari128@gmail.com.

ABSTRACT

The MSME sector plays a very important role in supporting the economy of Cibitung Village. The factors that make it difficult for MSMEs to access Islamic bank financing are that MSME managers do not yet have a good financial management system, manual and traditional business management, and household and company operational funds, so that they cannot be separated. Due to these technical limitations, MSME owners do not really think about business goals and long-term strategic plans. In Cibitung Village in the Bogor Regency area, most of the population still depends on the MSME sector for their livelihoods. This service aims to provide MSME stakeholders with an understanding of financial management, sharia accounts, sharia bank funding rules, financial reporting, and sharia bank funding proposals. The method of implementing this activity is to use the RRA (Rapid Rural Appraisal) method. This assistance has increased our understanding of our partners' material.

Keywords: Financing, MSMEs, Islamic Banking

ABSTRAK

Sektor UMKM memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang perekonomian Desa Cibitung Tengah. Faktor-faktor yang menyulitkan UMKM mengakses pembiayaan bank syariah adalah pengelola UMKM belum memiliki sistem pengelolaan keuangan yang baik, pengelolaan usaha yang masih manual dan tradisional, serta dana operasional rumah tangga dan perusahaan, sehingga tidak dapat dipisahkan. Karena keterbatasan teknis ini, pemilik UMKM tidak terlalu memikirkan tujuan bisnis dan rencana strategis jangka panjang. Di Desa Cibitung di wilayah Kabupaten Bogor, sebagian besar penduduknya masih bergantung pada sektor UMKM untuk mata pencaharian. Layanan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan UMKM tentang pengelolaan keuangan, rekening syariah, aturan pendanaan bank syariah, pelaporan keuangan, dan proposal pendanaan bank syariah. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan menggunakan metode RRA (*Rapid Rural Appraisal*). Dengan pendampingan ini telah meningkatkan pemahaman kami tentang materi mitra kami.

Kata-kata Kunci: Pembiayaan, UMKM, Perbankan Syariah.

I. PENDAHULUAN.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), jumlah UMKM, saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau senilai Rp 8.573,89 triliun. Sektor usaha ini juga mampu menyerap sebesar 97% dari total tenaga kerja, serta dapat menghimpun sampai dengan 60,42% dari total investasi di Indonesia. Sayangnya kontribusi UMKM tersebut belum diikuti dengan besarnya penyaluran kredit yang masih berkutat di angka 20%. Faktor penyebabnya antara lain karena sulitnya persyaratan pengajuan kredit dan usaha yang tidak memenuhi ketentuan layak untuk mendapatkan kredit perbankan.

Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik tahun 2020, sekitar 69,02% UMKM mengalami kesulitan permodalan di saat pandemi Covid-19. Sementara, menurut laporan pengaduan ke Kemenkop UKM per Oktober 2020, sebanyak 39,22% sektor UMKM mengalami kesulitan permodalan selama pandemi Covid19. (<https://berkas.dpr.go.id>). Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II-2021 tumbuh sebesar 7,07%, tertinggi dalam 16 tahun terakhir. Ini sekaligus mencatatkan rekor pertumbuhan triwulanan tertinggi sejak Krisis *Subprime Mortgage*, bahkan lebih tinggi dari negara *peers*. Pertumbuhan tersebut dicapai pada saat Kasus Aktif Covid-19 rata-rata selama Triwulan II-2021 yang tercatat mencapai sekitar 113.218 kasus (<https://ekon.go.id/>). Dalam rangka membantu UMKM terdampak pandemi Covid-19, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan diantaranya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dukungan UMKM. Pada tahun 2021, program PEN Dukungan UMKM mengalokasikan anggaran sebesar Rp 96,21 triliun yang dapat dimanfaatkan oleh

UMKM, antara lain Subsidi Bunga (KUR dan Non-KUR), Penempatan Dana Pemerintah pada Bank Umum Mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung, dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP). Selain itu, terdapat pula dukungan tambahan berupa pembebasan rekening minimum, biaya beban dan abodemen listrik yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM. Tercatat sampai 31 Desember 2021, total realisasi PEN Dukungan UMKM untuk tahun 2021 sebesar Rp 83,19 triliun dengan jumlah debitur/UMKM sebanyak 34,59 juta. Pada tahun 2022 Pemerintah kembali meningkatkan plafon KUR menjadi Rp373,17 triliun untuk mendorong sektor UMKM dan memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR 3% yang diberikansampai Juni 2022. Dalam rangka meningkatkan rasio pembiayaan UMKM oleh perbankan, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. PBI ini mengatur rasio kredit perbankan ke sektor UMKM menjadi paling sedikit sebesar 30% pada 2024. yang dilakukan secara bertahap, yaitu 20% pada 2022, 25% pada 2023, dan 30% pada 2024. Menindaklanjuti hal tersebut, perbankan telah menyiapkan beberapa strategi bisnis, seperti BNI pada 2022 mendorong untuk meningkatkan rasio kredit UMKM hingga 30% yang disertai dengan program pembinaan dan pendampingan sebagai upaya membantu pelaku UMKM naik kelas sekaligus mampu menembus pasar ekspor.

Saat ini UMKM penyaluran kredit perbankan untuk mencukupi kebutuhan

permodalan. Mengingat UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara, maka DPR RI melalui Komisi VI yang ruang lingkup tugasnya meliputi UMKM perlu mengajak pemerintah bersama-sama mencari solusi agar UMKM dapat memperoleh kredit perbankan dan rasio kredit perbankan untuk UMKM sebesar 30% pada 2024 dapat terwujud. DPR RI melalui Komisi VI mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan oleh perbankan, khususnya perbankan milik BUMN, bersama pemerintah yang telah mengupayakan memperbesar penyaluran kredit bagi UMKM. DPR RI dan Pemerintah mendorong UMKM di masa pandemic covid-19 agar tetap memanfaatkan berbagai platform belanja yang ada sehingga diharapkan pada tahun 2024 bertambah hingga mencapai 30 juta pelaku usaha dari 12 juta pelaku usaha yang ikutsaat ini sebagaimana yang dicita-citakan pemerintah (<https://berkas.dpr.go.id>). Jumlah UMKM di Kabupaten bogor cukup banyak, data jumlah UMKM Kabupaten Bogor dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel. I.1.
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Menengah di Kabupaten Bogor Tahun 2016-2021.

No	UMKM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah UMKM Bidang Industri	Usaha	16.397	18.677	19.493	20.468	21.491	18.100
2	Olahan makanan dan minuman	Usaha	10.357	11.804	12.319	12.935	14.648	80
3	Handy craft	Usaha	2.298	2.615	2.729	2.865	3.009	30
4	Konveksi	Usaha	3.053	3.474	3.626	3.807	3.998	50
5	Logam	Usaha	689	784	819	860	903	8
6	Jumlah UMKM	Usaha	1.109	1.262	1.317	1.383	2.452	48

Tahun 2021 sampai Triwulan 3
Sumber: <https://opendata.bogorkab.go.id/>

Para pengusaha di Desa Cibitung Tengah mempunyai usaha yang kebanyakan mengalami kesulitan informasi dalam pengajuan kredit mikro ke bank bagi pengembangan usahanya. Banyak pengusaha atau pelaku UMKM tersebut yang mengeluhkan mengenai ketidaktahuan atau ketidakpahaman mereka tentang proposal pengajuan kredit mikro ke bank. Hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan dan kurangnya informasi yang mereka terima. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penting untuk dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pelatihan dan pendampingan pembuatan proposal pengajuan kredit bank bagi para pelaku UMKM di Desa Cubutung Tengah.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

Dalam penelitian Rizal, Mustapita, & Kartika Sari (2019) menjelaskan bahwa penyusunan laporan keuangan dirasa dapat membekali para warga dalam memahami laporan keuangan, karena hasil yang diperoleh warga yang memiliki UMKM telah dapat membangun sebuah laporan keuangan sederhana seperti laporan mengenai laba rugi, perubahan ekuitas dan arus kas. Pelaporan keuangan yang baik tentu menjadi salah satu prasyarat untuk mengajukan pinjaman dari bank.

Dalam hal peminjaman dan penyaluran dana kepada masyarakat, praktik perbankan syariah berbeda dari praktik perbankan konvensional. Perbedaan yang paling mendasar adalah bank syariah tidak memiliki riba atau bunga dan menggunakan sistem pembiayaan bagi hasil (Musyarakah dan Mudharabah). Bank syariah memiliki potensi bisnis yang besar. Sistem perbankan syariah ini sangat cocok untuk pengembangan UMKM yang memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi bangsa. Hal ini bertujuan untuk lebih mengoptimalkan kontribusi bank syariah terhadap perkembangan UMKM. Contohnya adalah untuk meningkatkan aksesibilitas finansial dengan menyediakan persyaratan, pelatihan, dan dukungan bisnis yang lebih sederhana. Bank Islam atau syariah diharapkan dapat terus berkembang dalam memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (Karnina, 2018).

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka perlu digunakan proposal pendanaan Bank Syariah untuk memberikan pedoman pengelolaan keuangan bagi para pengurus UMKM di Desa Cibitung Tengah. Banyak masalah keuangan dengan mitra termasuk masalah modal, pengembangan usaha kecil, kinerja yang buruk, kesulitan dalam meningkatkan keuntungan bisnis, dan ketidakmampuan

dan keengganan sumber daya untuk menggunakan akuntansi. Dari berbagai persoalan tersebut, yang menjadi persoalan utama adalah sumber daya atau pelaku UMKM enggan menggunakan penawaran untuk mengajukan pembiayaan modal UMKM ke bank syariah.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Metode dalam kegiatan pelaksanaan pengabdian yang dilaksanakan Di Desa Cibitung Tengah, diawali dengan pengumpulan data dan informasi yang relevan. Untuk mendapatkan data dan informasi secara cepat dalam waktu yang terbatas akan mengadopsi metode RRA (*Rapid Rural Appraisal*). Hal itu relevan dengan tim pengusul yang terdiri dari latar belakang multidisiplin. Kemampuan memahami suatu permasalahan atau isu dengan perspektif lintas disiplin menjadi salah satu keunggulan dari metode ini. Menurut Beebe (1995), metode RRA menyajikan pengamatan yang dipercepat yang dilakukan oleh dua atau lebih pengamat dengan keahlian yang berbeda. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan hasil bagi keperluan pembuat keputusan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Sugiyono, 2013). Jumlah peserta yang didapatkan adalah 10 peserta sedangkan cara untuk menentukan peserta berdasarkan kelompok/area tertentu dalam hal ini adalah Desa Cibitung Tengah.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dalam rentang Juli sampai Agustus 2021 ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Ceramah Peserta diberikan motivasi agar memiliki kemauan untuk menggunakan manajemen

keuangan yang baik dalam kegiatan bisnisnya. Selain itu, peserta diberikan materi gambaran umum tentang manajemen keuangan UMKM dan peran penting manajemen keuangan bagi UMKM. Langkah pertama diselenggarakan selama 1,5 jam.

2. Metode Tutorial Peserta pelatihan diberikan materi tentang proposal pengajuan pembiayaan perbankan syariah mulai dari pencatatan sampai dengan menyusun laporan keuangan. Langkah kedua diselenggarakan selama 4 jam.
3. Metode Diskusi Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan keuangan UMKM dan perbankan syariah yang selama ini dihadapi. Langkah ketiga diselenggarakan selama 1,5 jam

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Pelaksanaan pengabdian ini bertujuan untuk mendukung upaya pengembangan UMKM di Desa Cibitung Tengah Kabupaten Bogor dan membantu UMKM lebih memahami konsep pembiayaan bank syariah. Hasil dari dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Bogor dan yang ada di wilayah lain yang lebih luas.

1. Materi Ceramah, Tutorial dan Diskusi.
Kegiatan dukungan Program Pinjaman Bank Syariah dalam pengembangan UMKM dilakukan di rumah tokoh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan setelah beberapa kali koordinasi dengan UMKM di Desa Cibitung

Tengah mengenai materi dan materi yang disampaikan, dan oleh peserta KKN di Desa Cibitung Tengah yang menjadi materi pendampingan. Waktu pelaksanaan PKM dan lokasi yang sesuai, seperti dalam dokumen perencanaan kegiatan yang direncanakan.

Dalam pendampingan ini, peserta mendapatkan modul materi yang diberikan oleh perwakilan narasumber kegiatan. Pelaku usaha UMKM yang mengikuti pelatihan berjumlah 10 orang peserta yang terdiri dari pelaku usaha UMKM di wilayah Desa Cibitung Tengah.

2. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan pokok bahasan:
 - a. Dasar-dasar manajemen keuangan
 - b. Penjelasan rekening syariah
 - c. Aturan pembiayaan dari bank syariah
 - d. Penyusunan laporan keuangan
 - e. Pembentukan proposal pengajuan pembiayaan
3. Pelaksanaan pendampingan diawali dengan registrasi peserta dan pembukaan. Selanjutnya, dilanjutkan dengan pemberian materi dengan materi dasar-dasar manajemen keuangan. Materi ini membahas pentingnya pencatatan segala jenis transaksi UMKM untuk membentuk pengelolaan keuangan yang baik. Sumber kedua pada subjek yang menjelaskan rekening Syariah dan aturan pendanaan bank syariah. Tujuan pemberian materi kepada peserta adalah untuk membantu mereka lebih memahami materi yang mendasari dukungan ini. Oleh karena itu, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi peserta

untuk bertanya dan aktif berdiskusi selama kegiatan mereka atau dalam proses memberikan saran. Mengajukan pinjaman ke bank syariah. Pada tahap diskusi, 5 peserta aktif berpartisipasi dalam diskusi dan mempersiapkan persyaratan pengajuan pinjaman bank. Pada sesi pendampingan terakhir, peserta diminta untuk menyusun laporan keuangan dan membuat proposal pendanaan di UMKM.

4. Pendampingan Penyusunan Proposal.

Dukungan Penyusunan Proposal Tim Pengabdian Masyarakat adalah sistem diskusi bagi pengusaha UMKM yang serius mengajukan proposal ke bank syariah karena tim lebih efektif dan fokus pada kebutuhan pengusaha UMKM akan disediakan. Ada beberapa responden yang merencanakan proposal. Setelah semua materi disampaikan, diskusi terbuka dan pertukaran pengalaman dengan para peserta berlanjut, memungkinkan tim untuk lebih memperdalam kebutuhan dan latar belakang keuangan para peserta. Materi disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Agar diskusi berjalan lancar, nyaman dan tertib, strategi yang dipilih adalah dialog interaktif dengan setiap proses dan tahapan yang disajikan. Hal ini membuat dukungan dalam penyusunan proposal lebih cair dan fokus.

5. Pendampingan Laporan Keuangan

Fase mendukung laporan tahunan peserta menjadi salah satu tolak ukur untuk menentukan kesediaan UMKM untuk mengajukan proposal yang telah dibuat sebelumnya. Pada

tahap ini, setiap materi yang disampaikan oleh tim PKM mendapat respon positif dari seluruh peserta dengan penuh kehati-hatian. Alokasi waktu diskusi dan aktivitas peserta juga terpantau, dengan sebagian besar peserta melontarkan pertanyaan yang sangat hidup dan berulang kali membahas isu-isu penutupan yang terjadi di perusahaan, pasti terkait panggung, atau terkait manajemen keuangan. UMKM. Tim menjawab berbagai pertanyaan dari peserta, memberikan contoh cara mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi, dan sebagian peserta belum menggunakan laporan keuangan secara berkala sehingga mudah dipahami oleh peserta. Dari 10 peserta, hampir seluruhnya tidak memiliki laporan keuangan yang baik dan benar sehingga membutuhkan cukup lama waktu untuk membuat laporan keuangan dari awal bahkan beberapa orang tidak memiliki nomor rekening dan adapula yang tidak mau membuat rekening karena ada rasa takut hilang dan tidak mengerti cara membuat dan menggunakan tabungan ataupun kartu ATM. Sehingga beberapa orang tidak bisa melanjutkan ketahapan peminjaman permodalan ke bank syariah.

6. Pendampingan Ke Bank Syariah.

Pada tahap pendampingan ke bank syariah ini peserta diberikan penjelasan simulasi menabung di bank syariah dengan menggunakan tiga jenis akad yang berbeda yaitu akad wadiah, akad musyarakah dan akad mudharabah serta mengarahkan peserta untuk mengikuti tahapan dan prosedural dalam pembiayaan UMKM baik itu

iB KUR Mikro ataupun iB KUR Kecil.

11:00 WIB.

<https://ekon.go.id/publikasi/detail/3196/pe-rtumbuhan-ekonomi-triwulan-ii-2021-menembus-zona-ekspansif>.

V. SIMPULAN.

Semua pihak akan diuntungkan dari pelaksanaan program pembiayaan ini bagi bank syariah, khususnya UmKM di Desa Cibitung Tengah. Tim pengabdian dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang cara menyampaikan saran untuk pembiayaan dan pengembangan usaha. Terjalannya kerjasama antara Desa Cibitung Tengah khususnya mahasiswa yang menjalankan program pengabdian kepada masyarakat, dan Institut Agama Islam Sahid Bogor pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Beebe, A. Steven, Susan J. Beebe & Mark V. Redmond. 2005. *Interpersonal Communication: Relating to Other*. Boston: Allyn and Bacon.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sholihin, Ahmad Ifham, 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tulus T.H. Tambunan. 2009. *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Februari-2022-2047.pdf diakses pada Tanggal 11 juli 2022 jam 13:00 WIB .
- <https://opendata.bogorkab.go.id/> diakses pada Tanggal 11 Juli 2022 Jam